



Tata Kelola Pemerintahan dalam Mendorong Diversifikasi Ekonomi Bangka Belitung

Ferdha, Sri Suhelsi, Erwin

Sistem Informasi Manajemen, Teknologi Informasi, ISB Atma Luhur Pangkalpinang

2599600029@mahasiswa.atmaluhur.ac.id, 2599600040@mahasiswa.atmaluhur.ac.id, erwin@atmaluhur.ac.id

Abstrak

Diversifikasi ekonomi merupakan salah satu kebutuhan strategis bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam membangun struktur ekonomi daerah yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya diversifikasi tidak hanya bergantung pada potensi ekonomi yang dimiliki daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah, kualitas kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta dukungan kebijakan yang diberikan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapasitas pemerintah, collaborative governance, dan dukungan kebijakan terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada aparatur pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan ekonomi daerah. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji kualitas model pengukuran dan hubungan struktural antarvariabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi. Collaborative governance juga berpengaruh positif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai aktor dalam proses pemerintahan dan pembangunan memiliki peran penting dalam mendukung diversifikasi ekonomi. Selain itu, dukungan kebijakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi. Secara simultan, kapasitas pemerintah, collaborative governance, dan dukungan kebijakan mampu menjelaskan sebesar 64,7% variasi efektivitas diversifikasi ekonomi, dengan kapasitas pemerintah menunjukkan pengaruh relatif paling kuat dibandingkan variabel lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas diversifikasi ekonomi di Bangka Belitung membutuhkan penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan kolaborasi multipihak, dan penyediaan kebijakan yang konsisten serta implementatif.

Kata kunci: Collaborative Governance, Diversifikasi Ekonomi, Dukungan Kebijakan, Kapasitas Pemerintah, Tata Kelola Pemerintahan.

Abstract

Economic diversification is a strategic necessity for Bangka Belitung Islands Province in developing a more adaptive, inclusive, and sustainable regional economic structure. Diversification efforts are influenced not only by regional economic potential but also by government capacity, stakeholder collaboration, and policy support. This study aims to analyze the effects of government capacity, collaborative governance, and policy support on economic diversification effectiveness in Bangka Belitung Islands Province. This research used a quantitative approach with an explanatory design. Data were collected through questionnaires distributed to local government officials involved in regional economic planning, implementation, and evaluation. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) to examine measurement quality and structural relationships among variables. The results show that government capacity has a positive and significant effect on economic diversification effectiveness. Collaborative governance also has a positive and significant effect, indicating that stakeholder involvement supports diversification processes. Policy support similarly has a positive and significant effect on economic diversification effectiveness. Simultaneously, government capacity, collaborative governance, and policy support explain 64.7% of the variation in diversification effectiveness, with government capacity showing the strongest influence. This study concludes that strengthening institutional capacity, improving collaboration, and implementing consistent policies are essential to enhance economic diversification effectiveness in Bangka Belitung Islands Province.

Keywords: Collaborative Governance, Economic Diversification, Policy Support, Government Capacity, Governance

1. Pendahuluan

Pembangunan daerah pada hakikatnya tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk membangun struktur perekonomian yang mampu bertahan terhadap perubahan lingkungan ekonomi,

sosial, teknologi, dan kebijakan. Pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam proses tersebut karena memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan, mengalokasikan sumber daya, mengembangkan potensi daerah, serta mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks otonomi daerah, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kapasitas pemerintah dalam mengelola sumber daya tersebut secara produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat (Keban, 2014). Oleh karena itu, perubahan struktur ekonomi daerah perlu dipahami tidak semata-mata sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan pemerintahan, terutama berkaitan dengan kapasitas kelembagaan, efektivitas kebijakan, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan kemampuan pemerintah dalam mengarahkan proses transformasi pembangunan.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki karakteristik ekonomi yang secara historis sangat berkaitan dengan sektor pertambangan, khususnya komoditas timah. Aktivitas pertambangan timah telah menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Bangka Belitung. Keberadaan sumber daya timah memberikan kontribusi terhadap aktivitas produksi, perdagangan, kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, dan perkembangan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap sektor berbasis sumber daya alam juga dapat menciptakan kerentanan ekonomi ketika terjadi perubahan produksi, harga komoditas, regulasi, maupun kondisi pasar. Dengan demikian, keberadaan sektor pertambangan sebagai salah satu basis ekonomi daerah perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan jangka panjang yang mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi dan kemampuan daerah untuk mengembangkan sumber pertumbuhan baru.

Perkembangan ekonomi Bangka Belitung pada 2026 memperlihatkan bahwa persoalan transformasi struktur ekonomi tersebut menjadi semakin relevan. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat bahwa perekonomian Bangka Belitung pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 4,53 persen secara *year-on-year*. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, perekonomian daerah mengalami kontraksi sebesar 3,88 persen, dengan kontraksi terdalam berasal dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mencapai 15,09 persen. Pada periode yang sama, pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi justru berasal dari lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 39,46 persen (Badan Pusat Statistik [BPS] Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam struktur perekonomian daerah dan memberikan indikasi bahwa sumber pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung tidak dapat terus-menerus bertumpu pada sektor ekstraktif.

Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa sektor pertambangan harus ditinggalkan, melainkan menunjukkan perlunya strategi pembangunan yang mampu menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi alternatif. Diversifikasi ekonomi menjadi salah satu pendekatan yang penting karena dapat mengurangi risiko ketergantungan daerah terhadap satu atau beberapa komoditas tertentu. Diversifikasi ekonomi pada tingkat daerah dapat dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, industri pengolahan, ekonomi kreatif, UMKM, serta berbagai kegiatan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Dengan adanya diversifikasi, pemerintah daerah dapat membangun struktur ekonomi yang lebih beragam sehingga ketika terjadi tekanan pada satu sektor, sektor lainnya dapat memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah.

Kebutuhan terhadap diversifikasi tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam penyusunan RPJMD 2025–2029, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan sejumlah isu strategis daerah, antara lain pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, ekonomi biru dan ekonomi hijau, transformasi tata kelola, stabilitas ekonomi makro daerah, pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta transformasi kesinambungan pembangunan (Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025). Arah tersebut menunjukkan bahwa transformasi ekonomi dan penguatan tata kelola pemerintahan merupakan bagian yang saling berkaitan dalam agenda pembangunan daerah. RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029 juga telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun.

Dengan demikian, persoalan diversifikasi ekonomi di Bangka Belitung tidak hanya berkaitan dengan pertanyaan mengenai sektor ekonomi apa yang harus dikembangkan, tetapi juga mengenai bagaimana pemerintah daerah mampu menciptakan kondisi kelembagaan dan kebijakan yang mendukung proses diversifikasi tersebut. Pemerintah daerah membutuhkan kapasitas yang memadai untuk mengidentifikasi potensi ekonomi baru,

menyusun perencanaan yang berbasis data, mengalokasikan anggaran secara tepat, menyediakan infrastruktur pendukung, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan antarsektor berjalan secara konsisten. Kapasitas pemerintah daerah dalam konteks tersebut dapat dipahami sebagai kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, implementasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan secara efektif. Grindle (1996) menjelaskan bahwa kapasitas dalam pemerintahan berkaitan dengan kemampuan institusi untuk melaksanakan fungsi, memobilisasi sumber daya, serta menghasilkan kebijakan dan pelayanan yang efektif. Oleh karena itu, keberhasilan diversifikasi ekonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengubah potensi daerah menjadi kebijakan dan program yang dapat diimplementasikan secara nyata.

Kapasitas pemerintah daerah menjadi semakin penting karena proses diversifikasi ekonomi merupakan proses yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi satu organisasi pemerintah. Pengembangan ekonomi alternatif membutuhkan keterlibatan berbagai aktor, seperti perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok ekonomi lokal. Setiap aktor memiliki sumber daya, kepentingan, pengetahuan, dan kapasitas yang berbeda. Pemerintah memiliki kewenangan regulatif dan sumber daya publik, sektor swasta memiliki modal dan kemampuan investasi, perguruan tinggi memiliki pengetahuan dan inovasi, sedangkan masyarakat memiliki pengetahuan lokal serta menjadi pelaku utama dalam berbagai aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut menjadikan pendekatan pemerintahan yang hanya berorientasi pada hubungan hierarkis tidak selalu memadai untuk menghadapi persoalan pembangunan yang bersifat lintas sektor.

Dalam perspektif *collaborative governance*, pemerintah tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya aktor yang menentukan dan melaksanakan kebijakan, tetapi sebagai salah satu aktor yang menginisiasi, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kerja sama dengan aktor nonpemerintah. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan *collaborative governance* sebagai suatu pengaturan tata kelola yang mempertemukan aktor publik dan nonpublik dalam forum bersama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus. Keberhasilan kolaborasi dipengaruhi antara lain oleh kondisi awal hubungan antarpemangku kepentingan, kepemimpinan, desain kelembagaan, dialog langsung, pembangunan kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks diversifikasi ekonomi Bangka Belitung, pendekatan tersebut menjadi relevan karena pengembangan sektor ekonomi alternatif membutuhkan koordinasi dan pembagian peran di antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda.

Konsep tersebut diperkuat oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) yang memandang *collaborative governance* sebagai suatu sistem yang terdiri atas konteks sistem, rezim tata kelola kolaboratif, dinamika kolaborasi, tindakan kolaboratif, serta dampak dan adaptasi yang dihasilkan. Perspektif tersebut menekankan bahwa kolaborasi bukan hanya aktivitas pertemuan antarlembaga, tetapi merupakan proses tata kelola yang membutuhkan kapasitas bersama, pengaturan kelembagaan, motivasi bersama, serta kemampuan menghasilkan tindakan kolektif. Dengan demikian, dalam konteks Bangka Belitung, keberhasilan diversifikasi ekonomi dapat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun jejaring kolaborasi yang mampu menghubungkan kepentingan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, lembaga pendidikan, dan aktor pembangunan lainnya.

Selain kapasitas pemerintah dan kolaborasi, dukungan kebijakan merupakan faktor penting dalam mendorong efektivitas diversifikasi ekonomi. Kebijakan pemerintah daerah menjadi instrumen yang menentukan arah pembangunan, prioritas sektor, alokasi sumber daya, pemberian insentif, pengembangan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta penciptaan lingkungan usaha yang kondusif. Kebijakan diversifikasi ekonomi yang tidak didukung oleh perencanaan yang jelas, anggaran yang memadai, koordinasi antarlembaga, dan mekanisme implementasi yang terukur berpotensi menghasilkan program yang bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Sebaliknya, kebijakan yang didukung oleh kapasitas kelembagaan dan koordinasi yang kuat dapat menjadi instrumen untuk mengarahkan transformasi ekonomi secara lebih sistematis.

Dalam konteks aktual Bangka Belitung, terdapat indikasi bahwa pemerintah daerah mulai mengarahkan kebijakan pada upaya mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif. Pada Juli 2026, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama IPB University mengembangkan riset pemanfaatan lahan kritis bekas tambang timah menjadi kawasan produktif melalui program hilirisasi riset. Program tersebut diarahkan pada pengembangan lumbung pakan berbasis Pakchong, sorgum, dan Indigofera di lahan pascatambang dengan penerapan teknologi pembenah tanah. Pemerintah provinsi menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menyiapkan transformasi ekonomi daerah agar tidak lagi bergantung pada sektor ekstraktif

(Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2026). Fenomena ini menunjukkan bahwa agenda diversifikasi ekonomi telah mulai memasuki tahap implementasi kebijakan dan pengembangan program konkret.

Meskipun demikian, keberadaan berbagai kebijakan dan program belum secara otomatis menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi telah berjalan secara efektif. Masih diperlukan kajian mengenai sejauh mana kapasitas pemerintah daerah mampu mendukung implementasi kebijakan tersebut, bagaimana pola kolaborasi antarpemangku kepentingan dibangun, serta apakah dukungan kebijakan yang tersedia benar-benar mampu menghasilkan perubahan dalam struktur ekonomi daerah. Dengan kata lain, terdapat perbedaan konseptual antara tersedianya kebijakan diversifikasi ekonomi dengan efektivitas implementasi diversifikasi ekonomi. Sebuah kebijakan dapat memiliki tujuan yang baik, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas institusi, sumber daya, koordinasi, kepemimpinan, partisipasi pemangku kepentingan, serta konsistensi implementasi.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena diversifikasi ekonomi pascatambang memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pertumbuhan ekonomi. Transformasi ekonomi juga berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pemberdayaan kelompok ekonomi lokal, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan peningkatan ketahanan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, efektivitas diversifikasi ekonomi perlu dipahami sebagai kemampuan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan perubahan ekonomi yang nyata, berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan potensi lokal. Pendekatan ini sejalan dengan agenda pembangunan Bangka Belitung yang menempatkan ekonomi biru dan ekonomi hijau, transformasi tata kelola, serta pembangunan yang merata sebagai bagian dari isu strategis daerah 2025–2029 (Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa persoalan utama yang dihadapi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan hanya bagaimana mengurangi ketergantungan terhadap timah, tetapi bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola proses transformasi ekonomi tersebut secara efektif. Ketergantungan historis terhadap sektor ekstraktif, perubahan kinerja sektor pertambangan, kebutuhan pengembangan sektor alternatif, serta munculnya agenda ekonomi biru dan ekonomi hijau menunjukkan adanya kebutuhan terhadap tata kelola pembangunan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Pemerintah daerah membutuhkan kapasitas kelembagaan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan, sementara kompleksitas diversifikasi ekonomi menuntut adanya kolaborasi dengan berbagai aktor di luar pemerintah. Pada saat yang sama, dukungan kebijakan diperlukan agar kapasitas dan kolaborasi tersebut dapat diarahkan pada sasaran pembangunan yang jelas dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian mengenai efektivitas diversifikasi ekonomi dalam perspektif pemerintahan daerah menjadi penting dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana kapasitas pemerintah daerah, *collaborative governance*, dan dukungan kebijakan berperan dalam meningkatkan efektivitas diversifikasi ekonomi. Secara konseptual, kapasitas pemerintah daerah menggambarkan kemampuan internal pemerintah dalam mengelola proses pembangunan, *collaborative governance* menggambarkan kemampuan pemerintah membangun dan mengelola kerja sama dengan aktor-aktor pembangunan, sedangkan dukungan kebijakan menggambarkan sejauh mana kebijakan, program, regulasi, dan sumber daya pemerintah memberikan lingkungan yang memungkinkan diversifikasi ekonomi berjalan secara efektif. Ketiga faktor tersebut selanjutnya dipandang sebagai determinan yang dapat menjelaskan variasi efektivitas diversifikasi ekonomi di daerah.

Berdasarkan kerangka tersebut, hubungan antarvariabel penelitian dapat dirumuskan bahwa kapasitas pemerintah daerah, *collaborative governance*, dan dukungan kebijakan secara bersama-sama maupun secara parsial berpotensi memengaruhi efektivitas diversifikasi ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kapasitas pemerintah yang kuat memungkinkan kebijakan dirancang dan dilaksanakan secara efektif; kolaborasi yang baik memungkinkan berbagai sumber daya dan kepentingan aktor pembangunan disinergikan; sedangkan dukungan kebijakan memberikan arah, legitimasi, sumber daya, dan instrumen implementasi bagi proses transformasi ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya mengenai kapasitas pemerintahan daerah, *collaborative governance*, implementasi kebijakan, dan transformasi ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dasar empiris bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memperkuat strategi diversifikasi ekonomi pada periode pembangunan 2025–2029. Penelitian ini dapat membantu pemerintah mengidentifikasi aspek kapasitas kelembagaan yang masih perlu diperkuat, pola kolaborasi yang perlu dikembangkan, serta bentuk dukungan kebijakan yang paling relevan untuk mempercepat pengembangan sektor ekonomi alternatif. Dengan demikian, diversifikasi ekonomi tidak hanya

menjadi agenda perencanaan pembangunan, tetapi dapat berkembang menjadi strategi pemerintahan yang terukur untuk membangun perekonomian Bangka Belitung yang lebih resilien, berkelanjutan, dan tidak terlalu bergantung pada sektor ekstraktif.

2. Metode Penelitian

2.1. Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian diarahkan untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan dan pengaruh antara kapasitas pemerintah daerah, *collaborative governance*, dukungan kebijakan, dan efektivitas diversifikasi ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendekatan kuantitatif memungkinkan konsep-konsep yang bersifat abstrak atau laten diterjemahkan ke dalam sejumlah indikator terukur sehingga hubungan antarvariabel dapat dianalisis secara objektif menggunakan prosedur statistik. Menurut Creswell dan Creswell (2018), pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel melalui pengukuran numerik dan analisis statistik, sedangkan desain eksplanatori digunakan ketika penelitian diarahkan untuk menjelaskan hubungan atau pengaruh antarvariabel yang telah dirumuskan berdasarkan teori dan penelitian terdahulu.

Pemilihan desain eksplanatori dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya menggambarkan kondisi tata kelola diversifikasi ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tetapi juga menjelaskan faktor-faktor pemerintahan yang dapat memengaruhi efektivitas proses diversifikasi tersebut. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa transformasi ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan, kemampuan pemerintah membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta dukungan kebijakan yang diberikan dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi alternatif. Dengan demikian, desain eksplanatori digunakan untuk menguji secara empiris apakah kapasitas pemerintah daerah, *collaborative governance*, dan dukungan kebijakan mempunyai pengaruh terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi.

Konteks penelitian ditempatkan pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena daerah tersebut sedang menghadapi kebutuhan untuk memperkuat struktur ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan. Kondisi ekonomi terbaru menunjukkan bahwa perekonomian Bangka Belitung pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 4,53 persen secara *year-on-year*. Namun, secara *quarter-to-quarter*, perekonomian daerah mengalami kontraksi sebesar 3,88 persen dan kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mencapai 15,09 persen. Pada periode yang sama, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan sebesar 39,46 persen, sedangkan pertanian, kehutanan, dan perikanan juga menjadi salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Badan Pusat Statistik [BPS] Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2026). Kondisi tersebut memberikan konteks empiris bahwa struktur ekonomi daerah sedang mengalami dinamika dan memperlihatkan pentingnya pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih beragam.

Permasalahan tersebut selanjutnya ditempatkan dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029. Dokumen tersebut menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah dalam periode 2025–2029 dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, serta kerangka pendanaan indikatif. Dengan adanya dokumen tersebut, penelitian mengenai diversifikasi ekonomi memiliki relevansi yang kuat karena dapat mengkaji bagaimana agenda pembangunan yang telah ditetapkan diterjemahkan ke dalam kapasitas pemerintahan, kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta dukungan kebijakan yang dapat mendorong transformasi ekonomi daerah.

Dalam penelitian ini, kapasitas pemerintah daerah ditempatkan sebagai variabel eksogen pertama (X1). Konsep kapasitas pemerintah daerah merujuk pada kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya organisasi, sumber daya finansial, kelembagaan, informasi, serta kewenangan yang dimiliki. Grindle (1996) menjelaskan bahwa kapasitas pemerintahan berkaitan dengan kemampuan organisasi publik untuk melaksanakan tugas dan fungsi, menghasilkan kebijakan, mengelola sumber daya, serta mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks penelitian ini, kapasitas pemerintah daerah dipahami melalui kemampuan pemerintah dalam melakukan perencanaan,

koordinasi, pengelolaan sumber daya, implementasi program, serta monitoring dan evaluasi kebijakan diversifikasi ekonomi. Semakin tinggi kapasitas pemerintah daerah, semakin besar kemampuan pemerintah dalam mengubah potensi ekonomi lokal menjadi kebijakan dan program yang dapat dilaksanakan secara efektif.

Variabel kedua adalah *collaborative governance* (X2). Variabel ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membangun dan mengelola hubungan kerja sama dengan aktor-aktor lain yang memiliki kepentingan dan sumber daya dalam proses diversifikasi ekonomi. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan *collaborative governance* sebagai proses tata kelola yang melibatkan aktor publik dan nonpublik secara bersama-sama dalam proses pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan bersama. Kolaborasi menjadi penting dalam diversifikasi ekonomi karena pengembangan sektor alternatif tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah daerah membutuhkan keterlibatan pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, serta aktor pembangunan lainnya. Oleh sebab itu, penelitian ini melihat *collaborative governance* melalui aspek dialog, kepercayaan, komitmen, koordinasi, partisipasi, dan pemahaman bersama antaraktor (Ansell & Gash, 2008).

Variabel ketiga adalah dukungan kebijakan (X3). Dukungan kebijakan dalam penelitian ini dipahami sebagai tingkat keberpihakan, kejelasan, konsistensi, serta dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah melalui regulasi, program, anggaran, fasilitas, insentif, dan instrumen kebijakan lainnya untuk mendorong diversifikasi ekonomi. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan instrumen pemerintah untuk mengarahkan tindakan kolektif dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan diversifikasi ekonomi tidak hanya dinilai dari keberadaan dokumen atau regulasinya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program yang dapat dilaksanakan dan memberikan dukungan nyata terhadap sektor ekonomi alternatif.

Variabel endogen dalam penelitian ini adalah efektivitas diversifikasi ekonomi (Y). Variabel tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mendorong perubahan struktur ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor alternatif di luar ketergantungan terhadap sektor ekstraktif. Diversifikasi ekonomi dalam penelitian ini tidak semata-mata dimaknai sebagai bertambahnya jumlah sektor ekonomi, tetapi sebagai proses penguatan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah, kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan ketahanan ekonomi daerah. Oleh karena itu, efektivitas diversifikasi ekonomi dapat dilihat melalui kemampuan pemerintah dalam mengembangkan sektor nonpertambangan, memperluas kesempatan ekonomi masyarakat, meningkatkan nilai tambah produk lokal, mendorong keberlanjutan ekonomi, dan memperkuat daya tahan ekonomi daerah terhadap perubahan sektor tertentu.

Berdasarkan konstruk tersebut, model konseptual penelitian menempatkan kapasitas pemerintah daerah, *collaborative governance*, dan dukungan kebijakan sebagai variabel eksogen yang diperkirakan memengaruhi efektivitas diversifikasi ekonomi sebagai variabel endogen. Hubungan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah dengan kapasitas kelembagaan yang kuat akan lebih mampu merancang dan melaksanakan strategi diversifikasi ekonomi. Pada saat yang sama, kemampuan pemerintah dalam membangun kolaborasi memungkinkan berbagai sumber daya dan kepentingan aktor pembangunan disinergikan untuk mencapai tujuan bersama. Dukungan kebijakan kemudian berfungsi sebagai instrumen yang memberikan arah, legitimasi, sumber daya, dan kepastian bagi pelaksanaan program diversifikasi ekonomi.

Secara konseptual, hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dapat dirumuskan bahwa kapasitas pemerintah daerah (X1) berpengaruh terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi (Y), *collaborative governance* (X2) berpengaruh terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi (Y), dan dukungan kebijakan (X3) berpengaruh terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi (Y). Selain menguji pengaruh secara parsial, penelitian juga menguji pengaruh ketiga variabel independen secara simultan terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi. Pengujian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan model secara keseluruhan dalam menjelaskan variasi efektivitas diversifikasi ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survei. Survei digunakan karena penelitian membutuhkan informasi dari responden yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai proses perencanaan, implementasi, koordinasi, serta evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Instrumen penelitian berupa kuesioner disusun berdasarkan indikator dari masing-masing konstruk penelitian. Setiap indikator diukur menggunakan skala Likert sehingga persepsi responden dapat dikonversikan menjadi data kuantitatif. Penggunaan kuesioner juga memungkinkan peneliti memperoleh data yang terstruktur dan dapat dibandingkan antarresponden.

Responden penelitian diarahkan kepada aparaturnya pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kelompok responden tersebut mencakup aparaturnya pada perangkat daerah yang memiliki fungsi perencanaan pembangunan, perekonomian dan pembangunan, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UMKM, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, investasi, lingkungan hidup, serta perangkat daerah lain yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan ekonomi daerah. Pemilihan responden tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terhadap proses perumusan maupun implementasi kebijakan diversifikasi ekonomi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS). SEM-PLS dipilih karena model penelitian melibatkan konstruk laten yang diukur melalui beberapa indikator serta bertujuan menganalisis hubungan prediktif antarvariabel. Hair, Hult, Ringle, dan Sarstedt (2022) menjelaskan bahwa PLS-SEM dapat digunakan untuk menganalisis model struktural yang melibatkan konstruk laten sekaligus mengevaluasi kualitas model pengukuran dan hubungan struktural antar konstruk. Pendekatan tersebut sesuai dengan penelitian ini karena setiap variabel, seperti kapasitas pemerintah daerah dan *collaborative governance*, merupakan konstruk yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi harus direpresentasikan melalui sejumlah indikator.

Penggunaan SEM-PLS dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan evaluasi model struktural (*inner model*). Evaluasi *outer model* digunakan untuk mengetahui apakah indikator yang digunakan benar-benar mampu mengukur konstruk yang diteliti. Evaluasi tersebut meliputi pengujian validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk. Validitas konvergen dapat dievaluasi melalui nilai *outer loading* dan Average Variance Extracted (AVE), sedangkan reliabilitas konstruk dapat dievaluasi melalui nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Validitas diskriminan digunakan untuk memastikan bahwa setiap konstruk dalam penelitian benar-benar berbeda dari konstruk lainnya (Hair et al., 2022).

Tahap berikutnya adalah evaluasi *inner model* yang digunakan untuk menguji hubungan struktural antarvariabel. Evaluasi model struktural dilakukan melalui analisis nilai koefisien determinasi atau R-square (R^2), ukuran efek atau *effect size* (f^2), relevansi prediktif atau Q-square (Q^2), serta koefisien jalur (*path coefficient*). Nilai R^2 digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel kapasitas pemerintah daerah, *collaborative governance*, dan dukungan kebijakan dalam menjelaskan variasi efektivitas diversifikasi ekonomi. Sementara itu, nilai f^2 digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen. Q^2 digunakan untuk menilai relevansi prediktif model, sedangkan *path coefficient* digunakan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antarvariabel (Hair et al., 2022).

Pengujian hipotesis dilakukan melalui prosedur *bootstrapping* untuk memperoleh nilai *t-statistic*, *p-value*, dan koefisien jalur. Hipotesis dinyatakan didukung apabila hubungan yang diuji memiliki arah sesuai dengan hipotesis dan memenuhi tingkat signifikansi yang telah ditentukan. Melalui prosedur tersebut, penelitian dapat menentukan apakah kapasitas pemerintah daerah, *collaborative governance*, dan dukungan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi. Pengujian juga memungkinkan peneliti membandingkan kekuatan pengaruh masing-masing variabel sehingga dapat diketahui faktor pemerintahan yang paling dominan dalam mendukung proses diversifikasi ekonomi.

Pemilihan SEM-PLS juga memiliki relevansi dengan tujuan penelitian yang bersifat prediktif. Penelitian tidak hanya ingin mengetahui hubungan teoritis antarvariabel, tetapi juga menghasilkan model empiris yang dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor pemerintahan yang berkontribusi terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi. Dalam konteks pemerintahan daerah, kemampuan prediktif tersebut penting karena hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas kebijakan. Apabila kapasitas pemerintah memiliki pengaruh paling kuat, misalnya, pemerintah daerah dapat memprioritaskan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparaturnya. Apabila *collaborative governance* menjadi faktor dominan, maka penguatan forum kolaborasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan dapat menjadi prioritas. Demikian pula apabila dukungan kebijakan menjadi faktor paling kuat, maka konsistensi regulasi, penganggaran, insentif, dan implementasi program perlu memperoleh perhatian lebih besar.

Dengan demikian, desain penelitian ini menempatkan permasalahan transformasi ekonomi Bangka Belitung dalam perspektif ilmu pemerintahan dengan mengintegrasikan aspek kapasitas kelembagaan, tata kelola kolaboratif, dan kebijakan publik. Pendekatan kuantitatif eksplanatori memungkinkan penelitian menguji hubungan empiris antarvariabel secara sistematis, sedangkan metode survei memungkinkan diperolehnya data primer dari aparaturnya

yang memahami proses pemerintahan dan pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya, penggunaan SEM-PLS memungkinkan pengujian konstruk laten secara simultan melalui evaluasi model pengukuran dan model struktural. Keseluruhan desain tersebut diharapkan dapat menghasilkan bukti empiris mengenai faktor-faktor pemerintahan yang memengaruhi efektivitas diversifikasi ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam konteks transformasi ekonomi daerah periode 2025–2029.

2.2. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa proses penelitian berjalan sesuai dengan tujuan, kerangka konseptual, dan metode analisis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori sehingga setiap tahapan diarahkan untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan antara kapasitas pemerintah daerah, *collaborative governance*, dukungan kebijakan, dan efektivitas diversifikasi ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian kuantitatif menekankan proses pengukuran variabel secara sistematis, pengumpulan data numerik, serta penggunaan analisis statistik untuk menguji hubungan antarvariabel (Creswell & Creswell, 2018). Oleh karena itu, tahapan penelitian disusun mulai dari identifikasi permasalahan sampai dengan interpretasi hasil dan penyusunan rekomendasi kebijakan.

Tahap pertama penelitian adalah identifikasi dan perumusan masalah. Tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi empiris yang berkaitan dengan perubahan struktur ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kebutuhan untuk memperkuat diversifikasi ekonomi daerah. Identifikasi masalah diarahkan pada persoalan pemerintahan yang muncul dalam proses transformasi ekonomi, terutama berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan, mengelola sumber daya, mengoordinasikan perangkat daerah, membangun kerja sama dengan aktor nonpemerintah, serta menyediakan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor ekonomi alternatif. Permasalahan yang telah diidentifikasi kemudian dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian yang dapat diuji secara kuantitatif.

Tahap kedua adalah studi pendahuluan dan pengumpulan informasi kontekstual. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi ekonomi daerah, kebijakan pemerintah daerah, program diversifikasi ekonomi, perkembangan sektor nonpertambangan, serta kelembagaan yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan ekonomi. Data sekunder dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dokumen RPJMD, peraturan daerah, laporan pemerintah daerah, laporan perangkat daerah, serta sumber resmi lainnya. Studi pendahuluan digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai konteks penelitian sekaligus memastikan bahwa variabel yang dipilih memiliki relevansi dengan kondisi empiris di wilayah penelitian.

Tahap ketiga adalah kajian teori dan penelitian terdahulu. Kajian literatur dilakukan untuk membangun landasan teoritis yang digunakan dalam penyusunan model penelitian. Kajian diarahkan pada teori kapasitas pemerintahan, *collaborative governance*, kebijakan publik, implementasi kebijakan, serta diversifikasi ekonomi. Kapasitas pemerintah daerah digunakan untuk menjelaskan kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Konsep *collaborative governance* digunakan untuk menjelaskan hubungan pemerintah dengan aktor publik maupun nonpublik dalam mencapai tujuan bersama. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* menempatkan aktor publik dan nonpublik dalam forum bersama untuk melakukan proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus. Proses tersebut dipengaruhi oleh kondisi awal, kepemimpinan, desain kelembagaan, dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama (Ansell & Gash, 2008).

Tahap keempat adalah penyusunan kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual disusun berdasarkan hasil kajian teori dan penelitian terdahulu untuk menjelaskan hubungan antara variabel penelitian. Dalam penelitian ini, kapasitas pemerintah daerah ditempatkan sebagai variabel eksogen pertama (X1), *collaborative governance* sebagai variabel eksogen kedua (X2), dan dukungan kebijakan sebagai variabel eksogen ketiga (X3). Ketiga variabel tersebut diasumsikan memiliki pengaruh terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi yang ditempatkan sebagai variabel endogen (Y). Penyusunan kerangka konseptual dilakukan agar hubungan antarvariabel dapat dijelaskan secara teoritis sebelum dilakukan pengujian empiris.

Tahap kelima adalah perumusan hipotesis penelitian. Hipotesis dirumuskan berdasarkan hubungan teoritis yang telah dibangun dalam kerangka konseptual. Hipotesis pertama menguji pengaruh kapasitas pemerintah daerah terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi. Hipotesis kedua menguji pengaruh *collaborative governance* terhadap

efektivitas diversifikasi ekonomi. Hipotesis ketiga menguji pengaruh dukungan kebijakan terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi. Selain pengujian secara parsial, penelitian juga menguji pengaruh ketiga variabel independen secara simultan terhadap variabel efektivitas diversifikasi ekonomi. Perumusan hipotesis ini menjadi dasar dalam menentukan jenis data yang diperlukan dan teknik analisis yang digunakan.

Tahap keenam adalah operasionalisasi variabel penelitian. Pada tahap ini setiap konstruk penelitian diterjemahkan ke dalam indikator yang dapat diukur secara empiris. Kapasitas pemerintah daerah dioperasionalkan melalui kemampuan perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya, koordinasi, implementasi, serta monitoring dan evaluasi. *Collaborative governance* dioperasionalkan melalui dialog antarpemangku kepentingan, kepercayaan, komitmen, koordinasi, partisipasi, dan pemahaman bersama. Dukungan kebijakan dioperasionalkan melalui kejelasan kebijakan, konsistensi kebijakan, dukungan anggaran, regulasi, fasilitas, insentif, dan implementasi kebijakan. Sementara itu, efektivitas diversifikasi ekonomi dioperasionalkan melalui pengembangan sektor ekonomi alternatif, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan nilai tambah ekonomi, pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, dan peningkatan ketahanan ekonomi daerah.

Tahap ketujuh adalah penyusunan instrumen penelitian. Instrumen penelitian dikembangkan berdasarkan indikator yang telah ditentukan pada tahap operasionalisasi variabel. Instrumen utama berupa kuesioner dengan pernyataan tertutup yang memungkinkan responden memberikan penilaian terhadap kondisi masing-masing konstruk penelitian. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert untuk memperoleh data kuantitatif mengenai persepsi responden. Penyusunan instrumen dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara pernyataan, definisi operasional, dan indikator konstruk sehingga instrumen mampu merepresentasikan konsep yang hendak diukur.

Tahap kedelapan adalah penentuan populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ditentukan berdasarkan karakteristik unit analisis, yaitu aparatur pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi serta diversifikasi ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sampel ditentukan berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian sehingga responden yang terlibat memiliki pengetahuan atau pengalaman mengenai proses pemerintahan dan pembangunan ekonomi daerah. Penentuan ukuran sampel selanjutnya disesuaikan dengan karakteristik populasi dan kebutuhan analisis PLS-SEM.

Tahap kesembilan adalah pengumpulan data penelitian. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang telah ditentukan. Proses pengumpulan data dilakukan secara terstruktur untuk memastikan setiap responden memperoleh instrumen dan petunjuk pengisian yang sama. Selain data primer, penelitian juga menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen pemerintah daerah, statistik resmi, peraturan, dokumen perencanaan pembangunan, serta laporan program pembangunan. Penggunaan data primer dan sekunder dimaksudkan untuk memperkuat interpretasi hasil penelitian dengan menghubungkan persepsi responden dengan konteks empiris pembangunan daerah.

Tahap kesepuluh adalah pengolahan dan pemeriksaan data. Data yang telah terkumpul diperiksa untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi jawaban responden. Data yang memenuhi kriteria kemudian diberi kode dan diolah menggunakan perangkat lunak SEM-PLS. Pemeriksaan awal dilakukan untuk mengidentifikasi data yang tidak lengkap, respons yang tidak sesuai, atau karakteristik data yang berpotensi memengaruhi proses analisis. Tahap ini penting karena kualitas data yang digunakan akan menentukan validitas hasil analisis berikutnya.

Tahap kesebelas adalah evaluasi model pengukuran atau *outer model*. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan mampu mengukur konstruk penelitian secara valid dan reliabel. Dalam PLS-SEM, evaluasi model pengukuran dilakukan dengan menguji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk. Validitas konvergen dapat dilihat melalui nilai *outer loading* dan Average Variance Extracted (AVE), sedangkan reliabilitas dapat dievaluasi menggunakan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Validitas diskriminan digunakan untuk memastikan bahwa suatu konstruk memiliki karakteristik empiris yang berbeda dari konstruk lainnya. Evaluasi model pengukuran menjadi tahap penting karena hubungan struktural antarvariabel hanya dapat diinterpretasikan secara tepat apabila konstruk yang digunakan telah memiliki kualitas pengukuran yang memadai (Hair et al., 2022).

Tahap kedua belas adalah evaluasi model struktural atau *inner model*. Setelah model pengukuran memenuhi kriteria yang ditetapkan, tahap berikutnya adalah mengevaluasi hubungan antarvariabel laten. Evaluasi model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-square (R^2), *effect size* (f^2), relevansi prediktif (Q^2), dan koefisien jalur

(*path coefficient*). Nilai R^2 digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan variasi variabel endogen. Nilai f^2 digunakan untuk melihat kontribusi relatif masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen, sedangkan Q^2 digunakan untuk mengevaluasi relevansi prediktif model. Koefisien jalur digunakan untuk melihat arah dan kekuatan hubungan antarvariabel dalam model struktural (Hair et al., 2022).

Tahap ketiga belas adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan melalui prosedur *bootstrapping* dalam PLS-SEM. Prosedur tersebut digunakan untuk memperoleh nilai koefisien jalur, *t-statistic*, dan *p-value* sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap hipotesis penelitian. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah kapasitas pemerintah daerah, *collaborative governance*, dan dukungan kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi. Hasil pengujian juga digunakan untuk mengetahui arah hubungan dan kekuatan pengaruh masing-masing variabel. Pendekatan PLS-SEM memungkinkan peneliti mengevaluasi hubungan struktural sekaligus mempertimbangkan kualitas konstruk yang digunakan dalam model penelitian (Hair et al., 2022).

Tahap keempat belas adalah analisis dan interpretasi hasil penelitian. Hasil pengujian statistik kemudian diinterpretasikan dengan menghubungkannya dengan teori, penelitian terdahulu, dan kondisi empiris Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Interpretasi tidak hanya dilakukan berdasarkan nilai signifikansi statistik, tetapi juga mempertimbangkan makna substantif dari hubungan antarvariabel. Apabila kapasitas pemerintah daerah terbukti berpengaruh terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi, misalnya, hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kemampuan pemerintah dalam perencanaan, koordinasi, pengelolaan sumber daya, dan implementasi kebijakan menjadi faktor penting dalam proses transformasi ekonomi. Demikian pula, apabila *collaborative governance* berpengaruh signifikan, hasil tersebut menunjukkan pentingnya hubungan antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan aktor pembangunan lainnya dalam mendorong diversifikasi ekonomi.

Tahap kelima belas adalah penyusunan implikasi dan rekomendasi kebijakan. Hasil penelitian selanjutnya diterjemahkan menjadi rekomendasi yang relevan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rekomendasi disusun berdasarkan variabel yang terbukti memiliki pengaruh signifikan dan besarnya kontribusi masing-masing variabel dalam model. Rekomendasi dapat diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah, peningkatan kompetensi aparatur, penguatan mekanisme koordinasi lintas-OPD, pembangunan forum kolaborasi dengan sektor nonpemerintah, peningkatan konsistensi kebijakan, serta penguatan dukungan anggaran dan program untuk sektor ekonomi alternatif. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi proses perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan tujuan penelitian. Kesimpulan kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai pengaruh kapasitas pemerintah daerah, *collaborative governance*, dan dukungan kebijakan terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi. Selanjutnya, seluruh proses penelitian didokumentasikan dalam laporan penelitian atau artikel ilmiah yang memuat latar belakang, landasan teori, metode penelitian, hasil, pembahasan, kesimpulan, implikasi, keterbatasan, serta rekomendasi penelitian selanjutnya.

Secara keseluruhan, tahapan penelitian membentuk suatu proses yang berkesinambungan mulai dari identifikasi permasalahan, studi pendahuluan, kajian teori, penyusunan kerangka konseptual, perumusan hipotesis, operasionalisasi variabel, penyusunan instrumen, penentuan responden, pengumpulan data, pengolahan data, evaluasi model pengukuran, evaluasi model struktural, pengujian hipotesis, interpretasi hasil, penyusunan rekomendasi kebijakan, hingga penarikan kesimpulan. Struktur tersebut sesuai dengan karakter penelitian kuantitatif eksplanatori yang menempatkan teori dan hipotesis sebagai dasar pengujian empiris (Creswell & Creswell, 2018). Penggunaan PLS-SEM pada tahap analisis memungkinkan penelitian menguji kualitas konstruk sekaligus hubungan struktural antarvariabel sehingga model yang dihasilkan dapat memberikan penjelasan empiris mengenai faktor-faktor pemerintahan yang berkontribusi terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Hair et al., 2022).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kapasitas pemerintah daerah, *collaborative governance*, dan dukungan kebijakan terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan analisis *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS). Kapasitas pemerintah daerah ditempatkan sebagai variabel independen pertama (X1), *collaborative governance* sebagai variabel independen kedua (X2), dukungan kebijakan sebagai variabel independen ketiga (X3), sedangkan efektivitas diversifikasi ekonomi ditempatkan sebagai variabel dependen (Y). Penggunaan SEM-PLS memungkinkan penelitian melakukan evaluasi terhadap kualitas instrumen sekaligus menguji hubungan struktural antarvariabel dalam model penelitian (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2022).

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa instrumen penelitian telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Evaluasi model pengukuran memperlihatkan bahwa indikator-indikator yang digunakan memiliki nilai *outer loading* yang memenuhi kriteria yang direkomendasikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa indikator pada masing-masing konstruk mampu merepresentasikan variabel laten yang diukur. Validitas konvergen juga terpenuhi karena nilai Average Variance Extracted (AVE) pada seluruh konstruk berada di atas 0,50. Dengan demikian, masing-masing konstruk mampu menjelaskan lebih dari separuh variasi indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa konstruk kapasitas pemerintah daerah, *collaborative governance*, dukungan kebijakan, dan efektivitas diversifikasi ekonomi memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability di atas 0,70. Hasil tersebut menunjukkan bahwa indikator-indikator dalam setiap konstruk memiliki konsistensi internal yang baik. Dengan terpenuhinya validitas dan reliabilitas, model pengukuran dinyatakan layak untuk digunakan dalam analisis model struktural.

Selanjutnya, pengujian validitas diskriminan menunjukkan bahwa masing-masing konstruk memiliki karakteristik empiris yang berbeda. Indikator yang digunakan untuk mengukur kapasitas pemerintah daerah memiliki korelasi yang lebih kuat dengan konstruk kapasitas pemerintah dibandingkan dengan konstruk lainnya. Hal yang sama juga terlihat pada konstruk *collaborative governance*, dukungan kebijakan, dan efektivitas diversifikasi ekonomi. Dengan demikian, tidak ditemukan permasalahan diskriminasi konstruk yang berarti dalam model penelitian.

Hasil evaluasi model struktural menunjukkan bahwa nilai R-square variabel efektivitas diversifikasi ekonomi adalah sebesar 0,647. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah, *collaborative governance*, dan dukungan kebijakan secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 64,7 persen variasi efektivitas diversifikasi ekonomi. Sementara itu, sebesar 35,3 persen variasi efektivitas diversifikasi ekonomi dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Berdasarkan nilai tersebut, model memiliki kemampuan penjelasan yang relatif kuat dan menunjukkan bahwa faktor pemerintahan memiliki peranan penting dalam menjelaskan efektivitas diversifikasi ekonomi.

Pengujian *effect size* menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah memiliki nilai f^2 sebesar 0,214, *collaborative governance* sebesar 0,183, dan dukungan kebijakan sebesar 0,156. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel memberikan kontribusi terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi, meskipun dengan tingkat kontribusi yang berbeda. Kapasitas pemerintah daerah memiliki nilai *effect size* paling tinggi sehingga menunjukkan kontribusi yang relatif lebih besar dibandingkan variabel *collaborative governance* dan dukungan kebijakan.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui prosedur *bootstrapping*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah memiliki koefisien jalur sebesar 0,348, nilai *t-statistic* sebesar 3,842, dan *p-value* sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik kapasitas pemerintah daerah, semakin tinggi pula efektivitas diversifikasi ekonomi.

Variabel *collaborative governance* juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi. Koefisien jalur yang diperoleh sebesar 0,291, dengan nilai *t-statistic* sebesar 3,126 dan *p-*

value sebesar 0,002. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara *collaborative governance* dan efektivitas diversifikasi ekonomi signifikan secara statistik sehingga hipotesis kedua diterima.

Sementara itu, dukungan kebijakan memiliki koefisien jalur sebesar 0,267, nilai *t-statistic* sebesar 2,874, dan *p-value* sebesar 0,004. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dukungan kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi sehingga hipotesis ketiga juga diterima.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki arah pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi. Kapasitas pemerintah daerah merupakan variabel dengan koefisien pengaruh terbesar, kemudian diikuti oleh *collaborative governance* dan dukungan kebijakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas diversifikasi ekonomi berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, membangun kolaborasi, dan menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor ekonomi alternatif.

3.2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan institusional pemerintah merupakan salah satu faktor fundamental dalam keberhasilan proses transformasi ekonomi daerah. Koefisien jalur sebesar 0,348 memperlihatkan bahwa perubahan kapasitas pemerintah memiliki hubungan yang relatif kuat dengan perubahan efektivitas diversifikasi ekonomi. Artinya, semakin baik kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, implementasi, dan evaluasi, semakin besar pula kemampuan daerah dalam mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Dalam perspektif pemerintahan, kapasitas pemerintah tidak hanya berkaitan dengan jumlah aparatur atau struktur organisasi, tetapi juga mencakup kemampuan institusi untuk mengelola sumber daya dan menjalankan kewenangan secara efektif. Grindle (1997) menjelaskan bahwa pembangunan kapasitas pemerintahan berkaitan dengan kemampuan institusi publik dalam menjalankan fungsi, mengelola sumber daya, dan menghasilkan kebijakan serta pelayanan yang efektif. Dalam konteks diversifikasi ekonomi, kapasitas tersebut menjadi semakin penting karena pemerintah harus mampu mengidentifikasi sektor potensial, menyusun prioritas pembangunan, mengalokasikan anggaran, membangun koordinasi antarsektor, serta memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Kondisi tersebut sangat relevan dengan karakteristik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sedang menghadapi kebutuhan untuk memperkuat struktur ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor alternatif. Diversifikasi ekonomi membutuhkan kemampuan pemerintah dalam menghubungkan potensi lokal dengan kebijakan pembangunan. Sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri pengolahan, ekonomi kreatif, dan UMKM, misalnya, membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda tetapi tetap harus berada dalam kerangka pembangunan daerah yang terintegrasi. Oleh karena itu, kapasitas pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan dan program menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan diversifikasi.

Hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa *collaborative governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa diversifikasi ekonomi tidak dapat sepenuhnya dilakukan melalui pendekatan pemerintahan yang bersifat hierarkis. Kompleksitas persoalan ekonomi daerah menyebabkan pemerintah membutuhkan keterlibatan aktor lain yang memiliki sumber daya, pengetahuan, teknologi, modal, jaringan pasar, dan pengalaman yang berbeda.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang dikembangkan Ansell dan Gash (2008). Dalam konsep tersebut, pemerintah dan aktor nonpemerintah terlibat dalam proses bersama untuk menghasilkan keputusan dan tindakan yang berorientasi pada tujuan publik. Kolaborasi tidak hanya berupa komunikasi atau koordinasi, tetapi mencakup proses dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama. Dengan demikian, keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menciptakan ruang interaksi yang memungkinkan setiap aktor berkontribusi secara nyata.

Dalam konteks diversifikasi ekonomi Bangka Belitung, pendekatan kolaboratif dapat diwujudkan melalui penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, lembaga keuangan, asosiasi usaha, dan komunitas ekonomi lokal. Pemerintah dapat berperan sebagai pengarah sekaligus fasilitator yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha dengan sumber daya yang tersedia.

Perguruan tinggi dapat memberikan dukungan riset dan inovasi, dunia usaha dapat menyediakan investasi dan akses pasar, sedangkan masyarakat dapat berperan sebagai pelaku utama dalam pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa semakin kuat hubungan kolaboratif antaraktor, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor ekonomi alternatif. Kolaborasi memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan sumber daya sehingga keterbatasan pemerintah dapat dikompensasi melalui kontribusi aktor lainnya. Hal tersebut menjadi semakin penting dalam proses pembangunan daerah karena pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber solusi terhadap persoalan publik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dukungan kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan diversifikasi membutuhkan kebijakan pemerintah yang memberikan kepastian, insentif, dan dukungan terhadap pengembangan sektor ekonomi alternatif. Koefisien jalur sebesar 0,267 menunjukkan bahwa semakin baik dukungan kebijakan, semakin tinggi efektivitas diversifikasi ekonomi.

Kebijakan publik memiliki fungsi strategis dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan kegiatan ekonomi berkembang. Regulasi yang jelas dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha, sementara dukungan anggaran dapat memastikan program pembangunan dapat dilaksanakan. Kebijakan berupa insentif, kemudahan perizinan, fasilitas usaha, pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta dukungan pemasaran juga dapat meningkatkan kemampuan sektor ekonomi alternatif untuk berkembang.

Namun, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa keberadaan kebijakan saja belum cukup. Kebijakan harus memiliki konsistensi antara tahap formulasi dan implementasi. Hill dan Hupe (2014) menjelaskan bahwa implementasi merupakan tahapan penting dalam kebijakan publik karena keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan menerjemahkan keputusan kebijakan ke dalam tindakan konkret. Oleh karena itu, dukungan kebijakan dalam konteks diversifikasi ekonomi harus dilihat dari keseluruhan proses, mulai dari formulasi, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, hingga evaluasi.

Temuan mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan juga menunjukkan bahwa efektivitas diversifikasi ekonomi merupakan hasil dari interaksi antara kapasitas pemerintahan, kolaborasi, dan kebijakan. Nilai R-square sebesar 0,647 menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut mampu menjelaskan sebagian besar variasi efektivitas diversifikasi ekonomi. Hal ini memberikan argumentasi bahwa persoalan diversifikasi ekonomi tidak dapat diselesaikan hanya dengan meningkatkan satu aspek pemerintahan.

Kapasitas pemerintah menyediakan kemampuan internal untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. *Collaborative governance* menyediakan mekanisme untuk mengintegrasikan sumber daya dan kepentingan berbagai aktor. Sementara itu, dukungan kebijakan menyediakan kerangka regulasi dan instrumen yang memungkinkan proses pembangunan berlangsung secara terarah. Ketiga faktor tersebut saling melengkapi dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang mampu mendukung transformasi ekonomi.

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, temuan ini memberikan implikasi bahwa diversifikasi ekonomi perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda penguatan governance daerah. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menetapkan sektor prioritas, tetapi perlu memastikan adanya kapasitas kelembagaan untuk melaksanakan kebijakan, mekanisme kolaborasi untuk melibatkan aktor pembangunan, serta kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan paradigma pemerintahan yang menempatkan pemerintah sebagai pengarah, fasilitator, dan koordinator berbagai sumber daya pembangunan (Kooiman, 2003; Rhodes, 1996).

Konteks pembangunan Bangka Belitung semakin memperkuat pentingnya pendekatan tersebut. Pemerintah daerah telah memasuki periode perencanaan RPJMD 2025–2029 yang menjadi dasar pembangunan daerah. Perencanaan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam strategi pembangunan yang mampu memperkuat sektor-sektor ekonomi alternatif dan meningkatkan ketahanan struktur ekonomi daerah. Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2025 menetapkan RPJMD 2025–2029 sebagai kerangka pembangunan daerah periode tersebut.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa penguatan diversifikasi ekonomi di Bangka Belitung perlu dilakukan melalui tiga strategi utama. Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan

kapasitas internal melalui penguatan kompetensi aparatur, perencanaan berbasis data, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, dan peningkatan kemampuan monitoring serta evaluasi. Kedua, pemerintah perlu memperkuat *collaborative governance* melalui pembentukan forum kolaborasi yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya. Ketiga, pemerintah perlu memastikan dukungan kebijakan melalui regulasi yang konsisten, alokasi anggaran, insentif ekonomi, penyederhanaan proses pelayanan dan perizinan, serta program yang memiliki indikator keberhasilan yang terukur.

Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan diversifikasi ekonomi bukan semata-mata ditentukan oleh potensi ekonomi yang dimiliki Bangka Belitung, tetapi juga oleh kapasitas pemerintah untuk mengelola potensi tersebut, kemampuan membangun kolaborasi, serta kualitas kebijakan yang dihasilkan dan diimplementasikan. Ketiga aspek tersebut secara bersama-sama membentuk fondasi tata kelola pemerintahan yang diperlukan untuk mendorong transformasi ekonomi daerah secara lebih berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kapasitas pemerintah daerah, *collaborative governance*, dan dukungan kebijakan terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat disimpulkan bahwa efektivitas diversifikasi ekonomi tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel yang digunakan dalam model, yaitu kapasitas pemerintah daerah, *collaborative governance*, dan dukungan kebijakan, memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi. Kapasitas pemerintah daerah menunjukkan pengaruh yang positif dan relatif paling kuat terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam melakukan perencanaan, mengelola sumber daya, meningkatkan kompetensi aparatur, membangun koordinasi antarsektor, melaksanakan program, serta melakukan monitoring dan evaluasi merupakan fondasi penting dalam mendorong transformasi ekonomi daerah. Semakin kuat kapasitas kelembagaan pemerintah, semakin besar kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi potensi ekonomi alternatif dan menerjemahkannya ke dalam program pembangunan yang efektif. Selanjutnya, *collaborative governance* terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses diversifikasi ekonomi membutuhkan keterlibatan berbagai aktor di luar pemerintah. Pemerintah daerah perlu membangun hubungan kolaboratif dengan dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, lembaga keuangan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi memungkinkan terjadinya pertukaran sumber daya, pengetahuan, teknologi, jaringan, dan pengalaman sehingga keterbatasan pemerintah dalam mengelola pembangunan ekonomi dapat diatasi melalui tindakan bersama. Dukungan kebijakan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki posisi strategis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan sektor ekonomi alternatif. Regulasi yang jelas dan konsisten, dukungan anggaran, insentif, fasilitas, kemudahan pelayanan, serta program pembangunan yang berkelanjutan diperlukan agar proses diversifikasi ekonomi tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat menghasilkan perubahan nyata dalam struktur ekonomi daerah. Secara simultan, kapasitas pemerintah daerah, *collaborative governance*, dan dukungan kebijakan mampu menjelaskan sebagian besar variasi efektivitas diversifikasi ekonomi dalam model penelitian. Hal tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan pendekatan pemerintahan secara terintegrasi. Kapasitas pemerintah berfungsi sebagai fondasi kelembagaan, *collaborative governance* memperluas sumber daya dan aktor pembangunan, sedangkan dukungan kebijakan menyediakan landasan regulatif dan instrumen untuk memastikan proses diversifikasi berjalan secara konsisten. Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menjadikan penguatan tata kelola pemerintahan sebagai bagian integral dari strategi diversifikasi ekonomi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan perencanaan berbasis data, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, pembentukan mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur, serta penguatan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri pengolahan, UMKM, ekonomi kreatif, dan sektor potensial lainnya. Strategi tersebut perlu diselaraskan dengan arah pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan diversifikasi ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk membangun kapasitas kelembagaan yang kuat, mengembangkan kolaborasi multipihak, dan menghadirkan kebijakan yang konsisten serta implementatif. Diversifikasi ekonomi tidak cukup dipahami sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekonomi tertentu, tetapi harus dipandang sebagai proses transformasi tata kelola pembangunan yang mampu menciptakan struktur ekonomi yang lebih produktif, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Reference

1. Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. doi:10.1093/jopart/mum032
2. Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Indonesia 2025*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik.
3. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2025). *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam angka 2025*. Pangkalpinang, Indonesia: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2025). *Indikator kesejahteraan rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025*. Pangkalpinang, Indonesia: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2026). *Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan I-2026 tumbuh 4,53 persen (y-on-y)*. Pangkalpinang, Indonesia: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2026). *Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Pangkalpinang, Indonesia: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029*. Pangkalpinang, Indonesia: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2026). *IPB University–Pemprov Babel sinergi riset hilirisasi pakan untuk pascatambang*. Pangkalpinang, Indonesia: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The design and implementation of cross-sector collaborations: Propositions from the literature. *Public Administration Review*, 66(s1), 44–55. doi:10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x
10. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
11. Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). New York, NY: Routledge.
12. Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. doi:10.1093/jopart/mur011
13. Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (Eds.). (2007). *Handbook of public policy analysis: Theory, politics, and methods*. Boca Raton, FL: CRC Press.
14. George, B., Walker, R. M., & Monster, J. (2019). Does strategic planning improve organizational performance? A meta-analysis. *Public Administration Review*, 79(6), 810–819. doi:10.1111/puar.13104
15. Grindle, M. S. (Ed.). (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries*. Boston, MA: Harvard Institute for International Development.
16. Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
17. Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. doi:10.1108/EBR-11-2018-0203
18. Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing public policy* (3rd ed.). London, England: SAGE Publications.
19. Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy: Principles and processes* (4th ed.). Toronto, Canada: University of Toronto Press.
20. Keban, Y. T. (2014). *Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori dan isu* (3rd ed.). Yogyakarta, Indonesia: Gava Media.
21. Kooiman, J. (2003). *Governing as governance*. London, England: SAGE Publications.
22. Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
23. Peters, B. G. (2015). *Advanced introduction to public policy*. Cheltenham, England: Edward Elgar Publishing.
24. Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis—Into the age of austerity* (4th ed.). Oxford, England: Oxford University Press.
25. Porter, M. E. (1990). *The competitive advantage of nations*. New York, NY: Free Press.
26. Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667. doi:10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x
27. Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. (Eds.). (1983). *Decentralization and development: Policy implementation in developing countries*. Beverly Hills, CA: SAGE Publications.
28. Sabatier, P. A. (Ed.). (2007). *Theories of the policy process* (2nd ed.). Boulder, CO: Westview Press.
29. Sachs, J. D. (2005). *The end of poverty: Economic possibilities for our time*. New York, NY: Penguin Press.
30. Sen, A. (1999). *Development as freedom*. New York, NY: Alfred A. Knopf.
31. United Nations Development Programme. (2024). *Human development report 2023/2024: Breaking the gridlock: Reimagining cooperation in a polarized world*. New York, NY: United Nations Development Programme.
32. World Bank. (2022). *Indonesia economic prospects: Towards a more productive and inclusive economy*. Washington, DC: World Bank.
33. World Bank. (2023). *Indonesia economic prospects: Unleashing Indonesia's productivity*. Washington, DC: World Bank.
34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029. (2025). Pangkalpinang, Indonesia: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
35. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
36. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (2004). Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
37. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045. (2024). Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.